BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikan penelitian terdahulu, agar memudahkan penulis dalam menentukan langkahi-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep. Bahwa tinjauan pustaka harus mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan permasalahan penelitian : teori, konsep-konsep, hasil penelitian, kesimpulani, kelemahan dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain (Ihsan, 2005:23).

Dalam penelitian ini, penulis harus belajar dari peneliti-peneliti lain untuk mencegah dari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang serupa seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Berikut adalah 3 (tiga) penelitian yang mengangkat tema Program Gerakan Literasi Sekolah yang menjadi penelitian penulis, berikut paparannya:

1) Kimiaissa'adah (2019) tentang "Implementasi Gerakan Literasi Membaca dalam Menumbuhkan Minat Baca Anak Usia Dini di TK Mutiara Hati Semarang" menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Gerakan Literasi Membaca di TK IT Mutiara Hati tertata pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, kemudian digabungkan dalam kegiatan pembiasaan dan terprogram,

seperti GERNAS BAKU, Perpustakaan Sekolah, dan Pojok Baca, yang dselaraskan dengan tingkat capaian perkembangan anak dan kompetensi dasar yang ingin dicapainya, diikuti proses evaluasi secara umum. Secara meluas, minat baca warga negara Indonesia masih terbilang sangat rendah. Hal ini terdapat kaitannya dengan minimnya pengenalan gerakan membaca pada anak, dimana usia terbaik dalam perkembangan kecerdasan dan minat seseorang ada pada usia dini.

2) Anggraeni (2019) tentang "Implementasi Gerakan Literasi Sekolah Tahap Pembiasaan Untuk Meningkatkan Karakter Gemar Membaca di SDN Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur" hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan GLS tahap pembiasaan sudah diimplementasikan selama dua tahun. Hasil dari implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah adalah pembiasaan membaca terhadap siswa disetiap hari atau pagi dengan durasi 15-25menit. Kegiatan siswa berliterasi dengan membaca bacaan nonpelajaran. Dalam hal ini juga terdapat program Literasi Digital dimana siswa sekolah dapat mengakses buku atupun cerita sesuai apa yang mereka inginkan dari bimbingan dari guru.

3) Fitriani (2019) tentang "Implementasi Gerakan Literasi Sekolah di SMP Kebon Dalem Kota Semarang" hasil menunjukan bahwa implementasi gerakan literasi di SMP Kebon Dalem Kota Semarang

menerangkan tahapan-tahapan pelaksanaan literasi merupakan tahapan pembiasaan yang harus dilakukan setiap hari atau pagi sebelum kegiatan pembelajaran di mulai dengan dengan durasi waktu membaca 15 menit. Tahapan pengembangan dan juga tahapan-tahapan pembelajarannya yaitu berupa program yang mendukung dari pelaksanaan gerakan literasi seperti membaca di pagi hari setiap hari, mini library dan pengadaan perpustakaan sebagai sumber literasi.

Tiga penelitian terdahulu membahas mengenai bagaimana Gerakan Literasi Sekolah diimplementasikan di satuan Pendidikan seperti taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut hampir seragam yaitu program GLS berfokus pada pembiasaan membaca bagi peserta didik di satuan kerja masing-masing. Perbedaannya hanya terletak pada subjek penelitian yaitu peserta didik TK, SD, dan SMP yang berlokasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada studi kali ini, dilakukan penelitian mengenai implementasi GLS di SMP Negeri 1 Kuningan, Jawa Barat.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Implementasi

Susilo (2007: 174) mendeskripsikan bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa

perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Implementasi juga dianggap sebagai gambaran pengoperasionalan atau penyelenggaraan aktivitas yang sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan sudah jadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan stakeholders , aktor, organisasi, publik atau privat, prosedur, dan teknik secara sinergitas yang bergerak untuk bekerjasama serta menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki.

Dari penjelasan di atas sudah dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan UU atau aturan dari pemerintah untuk mencapai satu tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah bagian terpenting dari proses kebijakan karena tanpa implementasi pembuat keputusan kebijakan tidak akan berhasil. Implementasi pada hakikatnya merupakan upaya pemahaman yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin (2008: 3-4) mendeskripsikan serta memaparkan bahwa ada dua istilah pada pengertian program, yaitu pengertian secara umum dan khusus. Menurut pengertian secara umum "program" diartikan sebagai "rencana". Sedangkan secara khususnya, apabila "program" ini langsung mengaitkan dengan evaluasi program maka dari itu program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu program kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi pada suatu organisasi yang melibatkan kelompok seseorang.

Dalam buku lain Suharsimi (2008: 291) mendeskripsikan program sebagai sesuatu kegiatan yang direncanakan dengan seksama. Program merupakan rencana atau rancangan dan sebuah kegiatan yang direncanakan dengan seksama. Suatu program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat dituntaskan dalam waktu yang singkat, tetapi sebuah kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan.

2.2.2. Model Implementasi Kebijakan

Model Implementasi kebijakan menjadi salah satu tahap pokok yang harus dilalui, mengingat sebaik apapun kebijakan, sebaik apapun sumber daya yang mendukung, apabila kebijakan tidak diimplementasikan maka kebijakan tersebut tidak akan berdampak apapun bagi sasaran kebijakan. Berikut akan dipaparkan mengenai model implementasi kebijakan dari beberapa ahli:

1) Edward III

Edward III (dalam Hasbullah, 2016: 99) mengemukakan empat variabel kritis agar implementasi kebijakan pendidikan menjadi efektif, yaitu:

a. Komunikasi

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan pendidikan dikomunikasikan pada organisasi publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan pendidikan, sikap dan tanggapan dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur

organisasi pelaksana kebijakan pendidikan disusun. Dalam hubungan komunikasi ini konteksnya ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu: transmisi komunikasi, kejelasan kebijakan pendidikan yang ingin dikomunikasikan, dan konsistensinya.

b. Sumberdaya

Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumberdaya manusia. Hal ini juga berkenaan pada kecakapan pelaksana kebijakan pendidikan untuk mengimplementasikan kebijakan pada pendidikan secara efektif.

c. Disposisi

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk mengeksekusi kebijakan pendidikan tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesedian dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Bagaimanapun dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan ini sangat ditentukan konsistensi tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Berhubungan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan pendidikan. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic pragmentation karena struktur birokrasi ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

Teori dari Edward III implementasi kebijakan Pendidikan menjadi dasar framework untuk analisi di penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Program Gerakan Literasi Sekolah diimplementasikan di SMP Negeri 1 Kuningan.

2) Grindle

Grindle (dalam Suharno, 2013: 172-173) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi kebijakan. Adapun yang dimaksud dengan isi kebijakan mencakup;

a. Sejauh mana kepentingan kelompok dengan sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan. Sebuah kebijakan yang didalamnya memuat kelompok sasaran akan lebih mudah diimplementasikan, daripada kebijakan yang tidak memuat kepentingan kelompok sasaran.
b. Jenis manfaat yang diterima oleh target groups, tentunya sebuah kebijakan akan bermanfaat jika sesuai dengan kebutuhan dari target groups.
c. Sejauh mana revolusi yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu kebijakan pada tujuan untuk mewujudkan perubahan fisik, seperti membangun jembatan atau jalan raya akan lebih mudah dijalankan dari pada kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan sumber daya manusia.

d. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah apakah implementator kebijakan tersebut sudah tepat diserahkan kesebuah institusi.

e. Apakah suatu kebijakan telah menyebutkan implementatornya secara rinci. Dalam hal ini instansi-instansi yang terkait sebagai implementator kebijakan. Kejelasan implementator kebijakan ini diperlukan selain untuk memudahkan implementator untuk memudahkan koordinasi, dan untuk memudahkan pengawasan oleh publik.

f. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Kebijakan yang tidak didukung oleh sumber daya yang memadai akan mendapatkan hambatan dalam pelaksanaanya. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya finasisal, maupun kompetensi dari implementator.

Sedangkan yang mencakup lingkungan implementasi kebijakan mencakup;

a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh individu-individu yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

b. Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa.

c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

3) Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2008: 94-95) mengungkapkan ada tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni; mudah/tidaknya masalah dikendalikan, kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi, lingkungan (nonstatuetory variables affecting implementation). Variabel mudah/tidaknya masalah dikendalikan mencakup;

a. Kesulitan teknis.
b. Keragaman perilaku kelompok sasaran.
c. Jumlah kelompok sasaran dibanding jumlah populasi.
d. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.

Kemudian variabel kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi mencakup;

a. Kejelasan dan konsistensi tujuan.
b. Digunakan teori kausal yang memadai.
c. Ketepatan alokasi sumber daya.
d. Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana.
e. Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana.
f. Rekruitmen pejabat pelaksana.
g. Akses formal pihak luar.

Sementara itu variabel lingkungan (*non-statuetory variables affecting implementation*) mencakup;

a. Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi.

b. Dukungan publik.

c. Sikap dan serta sumber yang dimiliki kelompok pemilih.

d. Dukungan dari pejabat atas.

e. Komitmen dan keterampilan pejabat-pejabat pelaksana

4) Van Mater dan Horn

Van Mater dan Horn (dalam Suharno, 2013: 176-177) Ada enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yakni;

a. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, karena ketidakjelasan standard dan sasaran kebijakan berpotensi untuk menimbulkan multi interpretasi yang akhirnya akan berimplikasi pada sulitnya implementasi kebijakan.

b. Implementasi perlu dukungan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia. Tidak memadainya sumber daya akan menyulitkan implementasi kebijakan.

c. Jalinan hubungan kerjasama yang sinergis diperlukan antar instansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

d. Karakteristik pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi kebijakan.
e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi, hal ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni yang mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik pendukung implementasi kebijakan.
f. Disposisi implementator mencakup tiga hal penting yakni:
    - Respon implementator terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
    - Kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan.
    - Intensitas disposisi implementator, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

5) Hogwood dan Gunn

Hogwood dan Gunn (dalam Solichin, 2008: 71) mengemukakan untuk mengimplementasikan kebijakan secara

sempurna maka diperlukan prasyarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan hambatan atau kendala yang serius.
b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber daya yang memadai.
c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
d. Kebijakan yang akan dijalankan memiliki suatu hubungan sebab akibat yang andal.
e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
g. Pemahaman yang mendalam dan juga kesepakatan terhadap tujuan.
h. Tugas- tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
j. Kelompk-kelompok yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

6) Chema dan Rondinelli

Chema dan Rondinelli (dalam Subarsono, 2008: 101) mengemukakan terdapat empat variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni:

a. Kondisi lingkungan.
b. Hubungan antar organisasi.
c. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program.
d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. g. Weimer dan Vining

7) Weimer dan Vining

Weimer dan Vining (dalam Subarsono, 2008: 103-104) menyebutkan tiga aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi program, yakni:

a. Logika kebijakan

   Hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (reasonable) dan mendapat dukungan teoritis.

b. Lingkungan tempat kebijakan diopoerasikan yang dimaksudkan dengan lingkungan tempat dioperasikan kebijakan menyangkut aspek lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis.

c. Kemampuan implementator

d. Kebijakan Keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementator kebijakan.

Dari ketujuh tokoh yang telah dipaparkan di atas model implementasi kebijakan berkaitan dengan bagaimana pedoman kebijakan yang telah ditetapkan dapat diberlakukan kepada sasaran kebijakan dengan mengkaji aspek yang berkaitan dengan komunikasi, sumberdaya, komitmen dan kecapakan dari pelaksana kebijakan, penyusunan struktur birokrasi, lingkungan kebijakan, isi kebijakan, dan karakteristik sasaran kebijakan.

2.2.3 Kegagalan Implementasi Kebijakan

1) Hogwood dan Gunn

Hogwood dan Gunn (dalam Solichin, 2008: 61-62) membagi dua kategori terkait kegagalan implementasi kebijakan, yakni:

a. Non implementation (tidak terimplementasikan)

Tidak terimplementasikan kebijakan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau

kemungkinan permasalahan yang digarap di luar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi.

b. Unsuccessful implementation (implementasi yang tidak berhasil)

Implememetasi yang tidak berhasil manakala suatu kebijakan yang telah dilaksanakan sesuai rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (semisal tiba-tiba terjadi peristiwa pergantian kekuasaaan, bencana alam, dan lain sebagainya) kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh faktor-faktor berikut;

- Bad execution (pelaksanaannya jelek).
- Bad policy (kebijakan yang jelek/dibuat dengan tidak mempertimbangkan data).
- Bad luck (kebijakan bernasib jelek).

2) Sunggono

Sunggono (dalam Hasbullah, 2016: 95) menyebutkan penyebab kegagalan implementasi kebijakan dikarenakan:

a. Informasi

Informasi akan mengalir secara efektif jika sekelompok orang yang bekerja sama saling peduli dan terbuka. Kekurangan informasi akan mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksanaan kebijakan.

b. Isi kebijakan

Implementasi kebijakan dapat gagal karena samarnya isi atau tujuan kebijakan, ketidaktepatan, ketidaktegasan internal maupun eksternal, atau kebijakan itu sendiri menunjukkan adanya kekurangan.

c. Dukungan

Dukungan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dukungan fisik dan non fisik. Apabila dalam pelaksanaannya tidak cukup dukungan, maka implementasi kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan.

d. Pembagian potensi

Pada dasarnya elemen pembagian potensi berkaitan dengan kinerja koordinasi masyarakat luas. Koordinasi dibutuhkan karena setiap pelaku memiliki latar belakang kepentingan dan keinginan yang berbeda, sehingga proses koordinasi menjadi titik sentral sebagai titik temu bagi keberhasilan pelaksanaan program pendidikan.

Mengenai kegagalan implementasi kebijakan dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan mungkin saja tidak berhasil dilakukan karena beberapa sebab antara lain karena implementator tidak bekerja secara efektif dan efesien, ketidaktahuan implementator mengenai permasalahan di lapangan, pedoman kebijakan dirumuskan dengan serampangan dan tidak bersumber dari data di lapangan, tidak tersampaikannya visi kebijakan, permasalahan yang digarap di luar jangkauan kekuasaannya, serta tidak adanya dukungan fisik dan non fisik dalam mengimplementasikan kebijakan sehingga kebijakan sulit direalisasikan.

Program adalah rencana dan sebuah kegiatan yang direncanakan dengan seksama. Jones dalam Rohman (2009: 101-102) menyebutkan bahwa program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program

dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Pelaksanaan program selalu terjadi dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang (Arikunto, 2004: 15). Sedangkan menurut Tayibnapis (2000: 9) mengartikan program sebagai segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Dalam buku ini program diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan seksama dan dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang. Dalam pengertian tersebut ada empat unsur pokok untuk dapat dikategorikan sebagai program, yaitu :

a. Kegiatan yang direncanakan atau dirancang dengan seksama. Bukan asal rancangan, tetapi rancangan kegiatan yang disusun dengan pemikiran yang cerdas dan cermat.
b. Kegiatan tersebut berlangsung secara berkelanjutan dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain.
c. Kegiatan tersebut berlangsung dalam sebuah organisasi, baik organisasi formal maupun organisasi non formal bukan kegiatan individual.
d. Kegiatan tersebut dalam implementasinya atau pelaksanaanya melibatkan banyak orang, bukan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan tanpa ada kaitannya dengan kegiatan orang lain.

Terdapat beberapa model implementasi kebijakan atau program yang dikembangkan oleh beberapa para ahli. Jones dalam Rohman (2009: 135) mengatakan bahwa, implementasi adalah suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Ada tiga pilar aktifitas dalam mengoperasikan program, yaitu :

a. Pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit –unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan.
b. Interpretasi, yaitu aktivitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
c. Aplikasi, yaitu berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

UNIVERSITAS NASIONAL

2.2.4 Gerakan Literasi Sekolah

Literasi merupakan penguasaan sistem-sistem tulisan konvensi-konvensi yang menyertainya. UNESCO menjelaskan bahwa kemampuan literasi merupakan hak setiap orang dan merupakan dasar untuk sepanjang hayat. Kegiatan literasi merupakan aktivitas membaca dan menulis yang terkait dengan pengetahuan membaca dan menulis terkait dengan pengetahuan, bahasa dan budaya (Rahayu, 2016:17).

Menurut Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjelaskan pengertian literasi dalam konsep GLS yakni, kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, atau berbicara. Pengertian literasi menurut Kern (2000: 23), literasi adalah praktik-praktik menginterpretasikan makna teks melalui situasi sosial, dan historis, serta kultural. Dari beberapa paparan tersebut dapat disimpulkan literasi merupakan kemampuan dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi sebagai proses berpikir, membaca, intrepretasi kemudian diwujudkan berupa tindakan menulis atau berbicara.

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan sebuah inovasi baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2015 dengan memiliki tujuan untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang literat melalui budaya membaca dan menulis. Hal tersebut dilandasi karena faktor kemampuan membaca dan menulis masyakat Indonesia masih kurang, hal tersebut dibuktikan dengan hasil survey Programme for International Student Assesment (PISA) dan dari *Progress in International Reading Literacy study* PIRLS. Rassol dalam Januarsidi (2014:6) menyatakan bahwa, literasi merupakan sebuah aktivitas kognitif yang terdiri dari kegiatan membaca dan menulis serta diukur dalam bentuk akuisisi keterampilan dari sesorang yang literat dibutuhkan kerjasama antara keluarga, pihak sekolah dan lingkungan sekitar agar terjalin

ekosistem literasi agar membantu proses belajar anak menjadi lebih efektif dan produktif.

Kegiatan GLS dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik untuk mengasai pengetahuan dengan baik dengan melibatkan kolaborasi warga sekolah dan peserta didik. Hal ini selaras dengan Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah yakni, GLS merupakan suatu usaha/kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah (guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/wali murid peserta didik), akademisi, penerbit, media massa, masyarakat (tokoh masyarakat yang dapat merepresentasikan keteladanan, dunia usaha dll.), dan pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam Panduan Gerakan Literasi Sekolah di SMP menjelaskan pengertian GLS merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik.

Dijelaskan dalam Desain Induk GLS memiliki dua tujuan yakni secara khusus dan umum. Tujuan secara umum yakni menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah, sedangkan tujuan khusus memiliki beberapa poin diantaranya; menumbuhkan budaya literasi di sekolah, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat, menjadikan sekolah

sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan, serta menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca.

Abidin (2015: 23) mengatakan, tujuan pembelajaran literasi abad ke-21 yakni;

1) Menciptakan siswa menjadi pembaca, penulis, dan komunikator yang efektif.
2) Mengembangkan kemampuan dan kebiasaan berpikir
3) Mendorong dan mengeksplorasi motivasi belajar
4) Menumbuhkan kemandirian siswa.

Tujuan pembelajaran literasi tersebut selaras dengan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) melalui Kemendikbud yang turut melakukan perubahan kurikulum, yakni dari KTSP menjadi Kurikulum 2013. Tujuan dari kegiatan literasi yakni melakukan usaha sadar pemerintah untuk pendidikan di Indonesia agar "melek huruf" yang cerdas dan memiliki kapasitas kemampuan untuk bersaing menghadapi kemajuan jaman. Selaras dengan program GLS yang di canangkan oleh mantan Kemendikbud Anies Baswedan, terdapat peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan kemajuanpendidikan nasional tercantum pada UndangUndang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3 yang berbunyi," Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa".

Setelah adanya kebijakan dari pemerintah perlu adanya 15 tindakan nyata dari peran pioner pendidikan yang mampu menyentuh langsung kepada anak bangsa/peserta didik yakni dari orang tua/keluarga dan juga instansi penyelenggara pendidikan/ sekolah. Hal ini selaras dengan penyataan Aminulloh (2016) menyatakan bahwa, kita perlu gerakan yang bottom up, yang berasal dari bawah dan bukan dari pemerintah yang top down". Sehingga perlu adanya feedback antara pemerintah dengan masyarakat terkait Pendidikan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Gerakan Literasi Sekolah yang bertujuan untuk menjadikan sekolah sebagai tempat untuk belajar (membaca dan menulis) agar warganya bisa selalu literat sepanjang hidup dengan melibatkan peran publik. Gerakan literasi sekolah ini wajib digalakkan karena minat membaca dan menulis masyarakat Indonesia masih tergolong minim. Program literasi sekolah ini diharapkan mampu membangkitkan minat membaca dan menulis sejak dini.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan bagian yang memaparkan dimensi-dimensi kajian utama, faktor-faktor dan hubungan-hubungan antar dimensi yang disusun dalam bentuk narasi dan grafis. Kerangka berpikir bersifat teoritis atau konseptual mengenai masalah yang akan diteliti.

Deskripsi mengenai kerangka berpikir disini adalah Gerakan Literasi Sekolah merupakan program yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dalam rangka membentuk minat membaca bagi siswa di Indonesia. Oleh karena itu, Gerakan Literasi Sekolah bertujuan untuk menumbuhkan minat baca, dan diharapkan mampu membiasakan siswa berkarya melalui tulisan-tulisan dan menjadi insan muda yang berpikir kritis dalam mengembangkan potensi pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Dalam kerangka beripikir dibawah ini penulis menjelaskan bahwa pada Implementasi Gerakan Literasi Sekolah di SMP Negeri 1 Kuningan, sekolah mempunyai kebijakan dalam menerapkan gerakan literasi sekolah bagi peserta didik dengan berpedoman dari tujuan literasi, prinsip literasi dan juga manfaat dilaksanakannya gerakan literasi, penerapan gerakan literasi tersebut dilaksanakan melalui tahap-tahap yang ada dalam pedoman pelaksanaan gerakan literasi sekolah dan kemudian setelah diterpakannya gerakan literasi sekolah, sekolah bisa mengerahui seberapa banyak antusiasme peserta didik yang ikut berperan aktif dalam kegiatan literasi yang dilaksanakan dan sekolah juga dapat mengerti faktor penghambat dan faktor pendukung dari penerapan gerakan literasi tersebut.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan seperti pada bagan sebagai berikut.

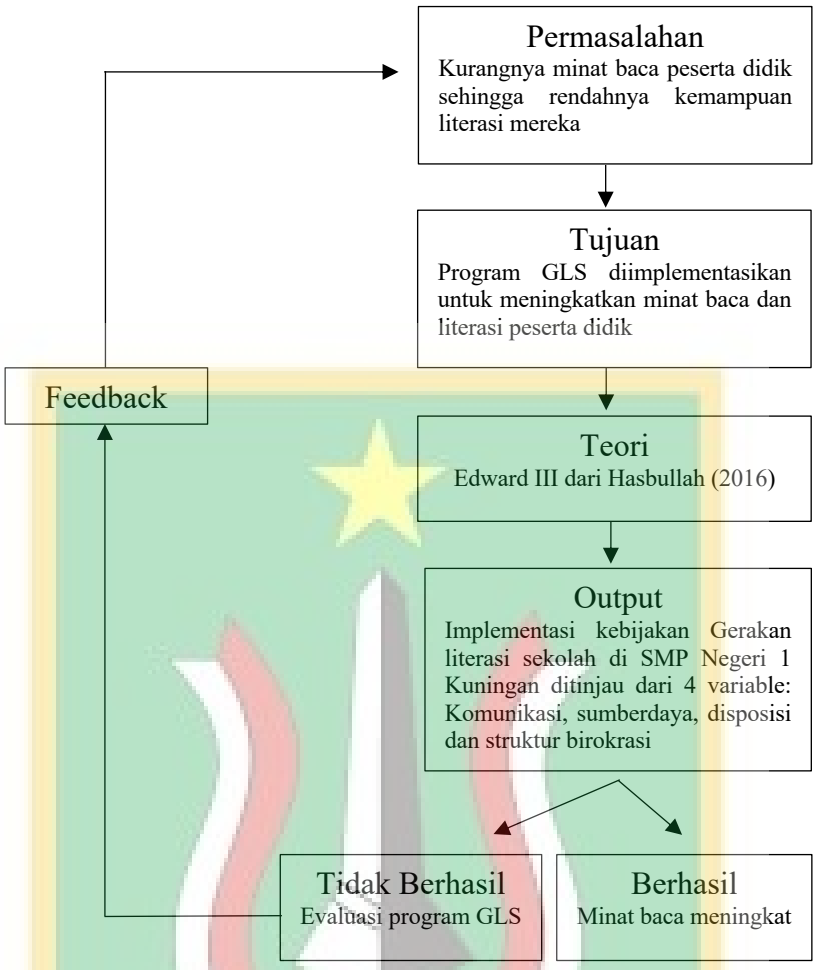

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran